

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Pedhophilia* Dalam Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional Dengan Hukum islam)”



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SYAFRI LETAHIT
10300112092

JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syafri Letahiit
NIM : 10300112092
Tempat/ Tgl. Lahir : Sawai/Ambon 09 Agustus 1993
Jur/ Prodi/ Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/ Program : Syaria'ah dan Hukum
Alamat : Jln Toddopuli 22 Blok 35 No. 12 Rt B
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhophilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara
Hukum Nasional Dengan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 November 2016

Penyusun,


Syafri Letahiit
NIM: 10300112062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara **SYAFRI LETAHIT**, NIM : 10300112092, mahasiswa jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan pada fakultas syariah dan hukum uin alauddin makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilian Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional Dengan Hukum Islam)"*. Memandang bahwa skripsi terdapat telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang ujian munaqasah (akhir).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 24 Maret 2017

Pembimbing I



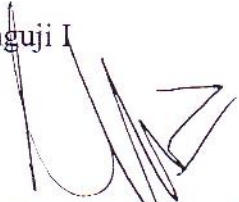
Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
Nip: 19540203 198503 1 002

Pembimbing II




Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Nip: 19710712 199703 2 002

Penguji I



Prof. Dr. H. Usman Jafar, M. Ag
Nip: 19580901 199102 1 001

Penguji II



Subehan Khalik, S. Ag., M. Ag
Nip: 19701018 1997031 1002

KATA PENGANTAR



Sebelumnya, saya ucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, karena dengan seizin-Nyalah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar.

Dalam tugas akhir ini penulis memberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak” (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)**

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak sekali kesulitan yang saya temui dan banyak pula bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Maka dengan selesainya penyusunan tugas akhir ini saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk seluruh pihak yang membantu. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada :

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. *Kasman Letahiit dan Aliyah Wahid* selaku kedua orang tua tercinta dan terkasih yang telah membesarkan serta mendidik penyusun dari bayi hingga meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag, sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dr. Kurniati, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Kak Canci selaku staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
5. *Dr. Dudung Abdullah, M. Ag* selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penyusun dalam merampungkan skripsi ini.

6. Bapak *Prof. Dr. H. Usman, MA* selaku penguji I dan Bapak *Subehan khalik* selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan secara metode kepada penguji untuk menyempurnakan setiap karya penulisan oleh penulis
7. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
8. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besarku yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan, terhusus pada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku tercinta.
10. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 51 kecamatan tompobulu kelurahan lebabng kabupaten bantaeng atas dukungan dan supotnya. Saya ucapkan terima kasih banyak
11. Dan kepada kakanda-kakanda senior dan adinda-adinda junior yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, diucapkan terima kasih.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*

Billahi taufik wal hidayah

Salama'ki Tapada Salama'

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian Judul	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKU TERHADAP KORBAN PEDHOFILIA.....	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Tindak Pidana Pedhofilis Menurut Hukum Nasional	24
C. Tindak Pidana Pedhofilis Menurut Hukum Islam	28

BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG	
PERLINDUNGAN ANAK.....	34
A. Pengertian Anak.....	34
B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.....	38
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN	
HUKUM ISLAM.....	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	44
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pedhophilia.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينًا *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

s.w.t	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
s.a.w	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ABSTRAK

Nama : Syafri Letahiit

Nim : 10300112092

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam) yang bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pedhophilia, 2) untuk mengetahui sanksi kepada pelaku tindak pidana pedhophilia, 3) untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kasus pedhophilia.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis, yang mengkaji permasalahan atau persoalan *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum di Indonesia yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 292 : “*Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain suatu kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”. Kemudian dalam pandangan hukum Islam sendiri menyatakan bahwa tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang terhormat, sebagai penyambung kehidupan, dan hubungan yang sah menciptakan suatu larangan khusus dimana pelanggaranannya merupakan suatu hukum yang berat yaitu zina. Berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Cara Refresif Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak mempunyai empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu. Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, Prinsip Menghargai Pandangan Anak

Implikasi dan tujuan umumnya bahwa untuk semua lapisan masyarakat dan khususnya aparat hukum harus memahami dampak buruk terhadap korban tindak pidana pedhophilia saling bahu membahu untuk menjaga hak asasi setiap manusia khususnya bagi anak dibawah umur dan tatkala penting adalah kita negara hukum harus sadar akan kepastian hukum dan harus diberlakukan sesuai koridornya tanpa pandang bulu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua yang merupakan cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generas mendatang yang diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Perlindungan terhadap anak pada suatu Masyarakat atau Bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan Nusa dan Bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹

Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi berguna bagi keluarga dimasa datang , bahkan menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Anak wajib

¹Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 1

dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, dan sosial), karena tindakan fasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial ²

Kata Pidana berasal dari kata *Starf*(Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.³ Dalam penggunaan populer, *Pedhophilia* berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut “*kelakuan pedhophilia*”. Misalnya, *The American Heritage Stedman’s Medical Dictionary* menyatakan, “*Pedhophilia* adalah tindakan atau fantasi dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak “.Aplikasi umum juga digunakan meluas ke minat seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur.Para peneliti merekomendasikan bahwa tidak dapat menggunakan

²Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 69

³Ekaputra Mahmud,” *Sistem Pidana didalam KHUP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*”(Medan: USU Pres,2010), h. 1

dihindari, karena orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak umumnya menunjukkan gangguan tersebut, tetapi beberapa perilaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk *pedhophilia*, dan standar diagnosa klinis berkaitan dengan masa pubertas. Selain itu, tidak semua Pedhofil benar benar melakukan pelecehan tersebut.

Pedhophilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari *pedhophilia* belum ditetapkan secara menakutkan. Penelitian menunjukkan bahwa *Pedhophilia* mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan *Neurologis* yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis forensik dan penegakkan hukum, berbagai tipologi telah disarankan untuk mengkategorikan *pedhophilia* menurut perilaku dan motivasinya⁴

Diketahui bahwa kasus *Pedhophilia* merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana mestinya dijelaskan dalam firman Allah SWT.

QS. Al-Isra:17/32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵

⁴Aries “*Pengertian Pedhophilia*”, <http://arieszanmyprince.blogspot.com/2012/03/Defenisi-Pedhofilian.html> (15 juni 2016)

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2009), h. 285

Ayat diatas melarang mendekati zina, bukan saja karena ia dapat mengantar kepada pembunuhan karakter dan masa depan. Tetapi juga, lebih – lebih dewasa ini perzinahan dapat mengantar kepada aborsi yang hakikatnya adalah pembunuhan anak. Ayat ini menegaskan bahwa: janganlah mendekati zina dengan hal-hal, walau dalam bentuk menghayalkannya, sehingga dapat mengantar kepada keterjurumusan dalam keburukan itu, Karena zina adalah perbuatan amat keji yang melampaui batas ukuran apa pun dan ia adalah jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁶

Terungkapnya kasus kekerasan seksual di *Jakarta Internasional School* (JIS) menjadi perhatian hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Masyarakat seakan tertampar dengan berita tersebut mengingat kasus terjadi di lembaga pendidikan anak bertaraf internasional dan diduga dilakukan oleh pegawai sekolah tersebut. Sekertaris Jendral Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Erlinda, menyatakan bahkan kepala sekolah JIS, diduga seorang Pedhophilia.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, khusus kekerasan seksual anak di Indonesia mengalami peningkatan. KPAI menyebutkan pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 329 kasus, atau 14,46 persen dari jumlah kasus yang ada. Sementara tahun 2012 jumlah kasus pun meningkat sebanyak 22.6 persen menjadi 746 kasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual

⁶M. Quraish Shihab “*Al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah Surah Al-Qur'an*” (Tangerang: Lentera Hati, 2012)

⁷Ratih Prabowosiwidan Daud Bahransyaf, “*Pedhophilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*” (Yogyakarta fak Hukum), h. 29.

pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen. Data ini diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita dimedia massa, dan investigasi kasus kekerasan seksual anak. Sekretaris Jendral KPAI mengatakan, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan presentase 60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus merupakan orang terdekat anak, bias jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Namun, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menemukan melalui penelitian di 21 Negara bahwa tingkat kekerasan yang dialami anak perempuan satu setengah hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, dan sebagian besar kekerasan dialami dalam lingkungan keluarga

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual secara fisik dan psikis, anak merupakan kaum yang lemah sehingga rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian yang dilakukan di Universitas Airlangga menyebutkan bahwa mayoritas kekerasan terjadi karena adanya ancaman dan paksaan (66,3 %), bujuk rayu (22,5 %). Dan dengan menggunakan obat bius (5,1 %)

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual

bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat yang ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai suatu kelainan seksual atau yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pedhofilia. Kajian ini merupakan kajian literatur yang mencoba menginformasikan mengenai fenomena pedhofilia dan kekerasan seksual yang dapat menjadi ancaman terhadap anak. Melalui literatur dan penelitian yang ada, kajian ini juga mencoba untuk menentukan apa yang telah dan dapat dilakukan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai bahayanya pedhofilia terhadap keselamatan anak serta memberikan batasan anak. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi titik tolak perumusan kebijakan perlindungan terhadap anak.⁸

Dalam bidang kesehatan *Pedhofilia* diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impflus seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan *Pedhofilias* umumnya harus diatas usia 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas)

⁸Ratih Prabowosiwidan Daud Bahransyaf, "*Pedhofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*" (Yogyakarta fak Hukum), h. 30.

Pedhophilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindakan pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masing-masing cenderung disempit artikan, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non-kontak seksual, seperti *Exhibitionist* dan Pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual; terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dengan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku Pedhophilia untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam khusus pedhophilia, penekanannya lebih pada eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan antar pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.⁹

Objek seksual pada Pedhophilia adalah anak-anak dibawah umur, Pedhophilia terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Pedhophilia Homoseksual : yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur
2. Pedhophilia Heteroseksual : yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur

⁹Muhammad Taufik Mappaodang, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedhophilia" Skripsi (Makassar fak.Hukum UMI), h.21.

Secara lebih singkat, *Robert G Meyer* dan *Paul Salmon* membedakan beberapa tipe Pedhophilia. Tipe pertama, mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua, mereka yang mempunyai perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang dikenal sebagai Pedhophilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seseorang dibawah umur. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perbuatan cabul, termasuk terhadap anak dibawah umur, diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum belasan tahun atau kalau umurnya belum jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.¹¹

¹⁰Muhammad Asmawi, "*Liku – Liku Seks Menyimpan Bagaimana solusinya*" (Yogyakarta: Darusalam offset, 2015), h. 95

¹¹Republik Indonesia, KUHP dan KUHPA (Jakarta: Pratama Publishing), h. 122

Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“ orang dewasa yang melakukan perbuatan dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”¹²

Anak akan menjadi *Lost Generation* (Generasi yang Hilang) dikarenakan orangtua yang tidak cakep dalam mendidik. Hal ini tersebut akan membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja di Sektor Formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal. Penjelasan mengenai Hak Asasi merupakan sesuatu yang sudah semestinya melakat pada diri setiap orang. Akan tetapi hak asasi tidak akan pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali Hak Asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperang aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Berdasarkan dengan uraian diatas. Maka penulis terdorong untuk mengangkat sebuah topik skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum**

¹²Republik Indonesia , KUHP dan KUHP (Jakarta: Pratama Publishing), h. 113

Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dari penjelasan tentang kasus kekerasan seks terhadap anak dibawah umur (Pedhophilia) maka rumuskan dari pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhophilia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus pedhophilia?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, perlu dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberikan batasan dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah :

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹³

Tindak pidana ialah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana benda yaitu “*starbaar feit*” starbaar feit, terdiri dari 3 kata yakni *starf*,

¹³Rena yulia. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta: graha ilmu 2010), h. 50

baar dan *fei*. Secara literl"ijk kata “*starf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.¹⁴

Dengan demikian tindak pidana yaitu

Pedhophilia ialah kondisi yang mempunyai keterkaitan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini ditunjukkan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.¹⁵

Hukum Nasional ialah yang merupakan konsep-konsep yang digunakan untuk menyampaikan “kehendak” aturan hukum. Termasuk di dalamnya antara lain asas hukum, fakta hukum, dan sebagainya.¹⁶

Hukum Islam peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang akui dan diyakini berlaku mengikat pemeluk agama Islam¹⁷

Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindunagn Anak (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dana Hukum Islam).

¹⁴Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel* Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

¹⁵Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, Ns. Marti Saragih, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 283-284

¹⁶Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (suatu kajian filosofis dan sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2007), h. 254

¹⁷Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3

D. Kajian Pustaka

Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka dapat dirangkum isi pokoknya sebagai berikut.

1. Nashriana dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Dalam buku ini menjelaskan tentang upaya upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dan perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Namun, dalam buku ini tidak menjelaskan secara detail langkah apa yang harus dilakukan baik selaku orang tua ataupun sebagai penegak hukum agar kiranya anak mendapatkan perlindungan yang selayaknya.
2. Abdul Hakim, dalam bukumnya *Perlindungan Anak* yang menjelaskan perlindungan anak yang serupa merupakan salah satu perlindungan yang melalui pendekatan yuridis. Namun, dalam buku tersebut tidak menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang dilihat dari beberapa aspek atau beberapa pendekatan. Akan tetapi hanya menjelaskan dari sisi pendekatan yuridis seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut
3. Eka Putra Mahmud dan khair Abdul, dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pidana Didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Menjelaskan secara singkat mengenai pengertian tindak pidana. Akan tetapi

dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pemberian hukuman bagi seseorang atau pelaku tindak pidana

4. Muhammad Asmawi dalam bukunya berjudul *Liku liku Seks Menyimpang* dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana solusinya yang lebih kepada penjelasan mengenai beberapa tipe pedhophilia akan tetapi dalam buku tersebut tidak menjelaskan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pedhophilia dalam dua tipe yang dijelaskan didalam buku tersebut.
5. Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* menjelaskan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, dalam buku ini tidak menjelaskan secara detail tentang perlindungan hukum terhadap anak.
6. M. Quraish Shihab *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an* dalam buku tersebut menjelaskan sebuah ayat yang menjelaskan tentang perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang melampaui batas dalam ukuran apapun. Akan tetapi tidak menjelaskan secara detail bahwa perbuatan zina merupakan suatu perbuatan tindak pidana pedhophilia. akan tetapi lebih kepada perbuatan membunuh nyawa orang dan dampak dari perbuatan zina itu sendiri

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian ini merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹⁸

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normative, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan yuridis

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tinjauan yuridis tentang kasus anak di bawah umur. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

b. Pendekatan *syar'i*

Syar'i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁸Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 279

¹⁹Tim Penulis UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder.

- a) Data primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
- b) Data sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam perlindungan hukum dan hukum pidana terhadap kasus yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan materi yang sesuai dengan judul yang angkat.
2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi

efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.

3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklarifikasi sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum yaitu :

Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang kasus korban tindak pidana pedhophilia

b. Tujuan khusus yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kasus pedhophilia dalam hukum Islam
2. Untuk mengetahui penerapan hukum sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedhophilia
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana kasus pedhophilia

2. Kegunaan

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian inidiharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai kasus pedhophilia.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan mencoba membandingkan antara Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia akademisi dan masyarakat mengenai pandangan hukum nasional dan hukum Islam tentang kasus pedhophilia.
- 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDHOFILIA

A. *Perlindungan hukum*

Perlindungan hukum merupakan wujud kepedulian, sekaligus menjadi tugas, kewajiban tanggungjawab pemerintah kepada warga negaranya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban warga Negara disemua semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Undang-undang No. 23 Tahun perlindungan anak. Merupakan kepastian hukum terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002, dan bagi pelaku tindak pidana terhadap hak-hak anak diberikan sanksi hukum pidana.

Khusus konvensi hak anak (*Convention of Right Of The Child*) pada 20 November 1989 yang diratifikasikan oleh Indonesia dengan kepres No. 36 Tahun 1990, sering dipersoalkan karena dengan Kepres tidak mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang. Sebenarnya tidak terbatas pada persoalan retifikasi dengan Kepres atau dengan undang-undang, tetapi dikarenakan Konvensi Hak-hak anak tidak mengatur ketentuan pidana.²⁰

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

²⁰Maulana Mappaodang, *Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedhophilia (Studi Khusus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2013)* Skripsi (Makassar, Fak. Hukum UIN), h. 17

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Sehubungan dengan hal pengertian hal pengertian tindak pidana Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Setelah melihat pemaparan dari pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana dan beberapa penjelasan lain tentang tindak pidana, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mempunyai aturan hukum yang mengikat, yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula mula kita dapat jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitan Undang-

²¹Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), h.62

Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari di pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *Oormerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai Negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

- 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²²

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

Keberadaan hukum didalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat dan perbuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dimasyarakat.

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum

Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori yaitu :

Pertama, teori keadilan (Teori Etis, Aristoteles) yaitu sudut pandangnya yang menyatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan antara warga masyarakat.

²²P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 193.

²³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 88.

Yang pertama kali menganut teori ini adalah Aristoteles yang terkenal dengan “Teori Etis” yang dikemukakannya dalam buku *Ethica Nicomachea* dan Reterico ia menyatakan bahwa tugas hukum adalah memberikan keadilan pada warga masyarakat.

Adapun pengertian keadilan menurut Aristoteles ialah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya, untuk itu Aristoteles membagi keadilan atas 2 macam, yaitu:

1. Keadilan Distributif: suatu keadilan yang memberi jatah/ imbalan sesuai dengan apa yang dilakukan, diberikan, prestasi, dan jasanya. Hal ini banyak berlaku di lapangan hukum publik.
2. Keadilan kumulatif : suatu keadilan yang memberikan jatah/ imbalan sama banyak terhadap tiap-tiap orang dengan tidak mengingat jasa-jasa/ prestasi perseorangannya, konsep ini banyak berlaku di lapangan hukum perdata.

Kedua, Teori Utility (Kemamfaatan, Jeremy Bentham) yaitu Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori utilitasnya (Kegunaan) berpendapat bahwa hukum itu memberikan kemamfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Jadi hukum itu bisa saja mengorbankan kepentingan individu /perseorangan asalkan kepentingan masyarakat luas terpenuhi.

Ketiga, kepastian hukum (Yuridis Formal, Van Kan) yaitu hukum itu bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap manusia/orang sehingga tidak dapat diganggu. Jadi meskipun aturan atau pelaksanaan hukum terasa tidak adil dan

tidak memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak tidak menjadi masalah asalkan kepastian hukum terwujud.²⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa ada tiga aliran yang bisa dicapai oleh tujuan hukum. Menurut Gustaf Radbruch, idealnya setiap aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan harus mencapai atau mewujudkan ke-3 aliran tersebut. Tetapi terkadang dalam khusus tertentu, sering terjadi bentrok antara ke-3 aliran tersebut. Kadang terjadi bentrok antara nilai keadilan dengan kemanfaatan atau bentrok antara nilai keadilan dengan kepastian hukum. Untuk itu, menurut Gustav Radbruch bila terjadi bentrokan harus dipakai skala prioritas, yaitu pertama memprioritaskan keadilan, baru kepastian lalu kemanfaatan.

B. Tindak Pidana Pedhophilia menurut Hukum Nasional

Sebelum membahas lebih jauh masalah tindak pidana pedhophilia menurut hukum nasional yang perlu kita ketahui sebelumnya apa itu hukum nasional itu sendiri. Hukum nasional (hukum pidana umum) adalah hukum pidana yang berlaku untuk umum, jika istilah hukum pidana digunakan dalam arti luas, maka hukum pidana umum ini mencakup kitab undang-undang hukum pidana (hukum pidana material) serta peraturan perundang-undangan terkait dan kitab undang-undang hukum acara pidana (hukum pidana material) serta peraturan perundang-undangan terkait.²⁵

pedhophilia. Secara harfiah phedophilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidohilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat

²⁴Arfan Efendi, "Tujuan dan Fungsi Hukum," <http://dimensiilmu.blogspot.com/2013/11/tujuan-dan-fungsi-hukum.html> (28 Oktober 2016)

²⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 9.

seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditunjukkan kepada orang dewasa yang memiliki kondisi ini. Dalam bidang kesehatan *pedhofilia* diartikan sebagai kelainan seksual yang berupa hasrat atau fantasi implus seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan *pedhofilia* umumnya harus diatas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (*Anak Pra- Pubertas*)

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat

penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.²⁶

Hukum perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan, “ Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.”²⁷

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berpartisipasi serta berhak atas

²⁶<http://Eprints.urn.co.id/2012/2/Dinamika-Psikologi-kekerasan-seksual-studi-fenomologi-pdf>.

²⁷Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 86

perlindungan dari tindakan kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedhofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang dibawah umur. Sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perbuatan cabul, termasuk terhadap anak dibawah umur, diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain suatu kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”²⁹

C. Tindak Pidana Pedhofilia menurut Hukum islam

Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal ini yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan. Sebagai tanda kekuasaannya, maka jelaslah seksualitasnya mempunyai fungsi yang suci dan saklar. Hubungan antara jenis ini dalam Al-Quran juga menjadi objek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual

²⁸Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 105.

²⁹Republik Indonesia, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Parama Publisng), h. 113

sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.³⁰

Berbicara mengenai hukum islam perlu kita ketahui bahwa hukum islam termasuk dalam kategori hukum pidana khusus, artinya hukum pidana khusus merupakan hukum pidana di luar KUHP dan memiliki sejumlah ketentuan khusus (penyimpangan) terhadap KUHP. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (KUHP) berlaku juga terhadap Undang-Undang di luar KUHPid sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang di luar KUHP tersebut.³¹

Ajaran islam jelas melarang perilaku *Pedhophilia* karena prinsip pernikahan seks yang meniscayakan hubungan seks harus didasarkan ikatan pernikahan, sementara ikatan pernikahan diharuskan memenuhi persyaratan baliqh dan berakal. Artinya hubungan seks yang boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Dalam islam ukuran baliqh bagi seorang perempuan ialah sudah melewati masa *iddah* (haid) pertamanya setelah ia mengalami menstribasi.³²

Jadi, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.

1. Secara Yuridis Normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lain secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil,

³⁰Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexsualiy In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, terj, Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), h. 31.

³¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 10.

³²Ivon Nendah, "Pedhophilia", *Kompasiana Online*

yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang di perintahkan oleh Allah swt.

2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang menerima sesuatu secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *Mukallaf*. Mukallaf adalah orang islam yang sudah baliqh dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut.

1. Dari segi berat dan ringannya hukuman, maka hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi :
 - a. Jarimah hudud
 - b. Jarimah qhisash
 - c. Jarimah ta'zir
2. Dari segi unsur niat ada dua jarimah yaitu yang disengaja dan yang tidak disengaja.
3. Dari segi mengerjakan, jarimah itu ada dua yaitu yang positif dan negatif
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua yaitu perorangan dan kelompok
5. Dari segi tabiat, jarimah terbagi menjadi dua yaitu bersifat biasa dan bersifat politik.³³

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak

³³Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 22

mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.³⁴

Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung

³⁴<http://blogspot.uns.co.id/2014/4/kekerasan-seksl-terjadap-anak-studi-anak-dampak-dan-pengaruhnya-pdf>.

kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat

pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Sisca & Moningga (2009) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya.

Mboiek (1992) dan Stanko (1996) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

Suhandjati (2004) mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda.

The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

1. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.
3. Kekerasan Perspektif Gender

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturachman, 2002) ³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh *MS Magazine* (dalam Warshaw, 1994) menunjukkan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami perkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% tidak dapat melupakan.

³⁵<http://blogspot.uns.co.id/2014/4/kekerasan-seksl-terjadap-anak-studi-anak-dampak-dan-pengaruhnya-pdf>.

BAB III
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³⁶

Anak merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagai firman Allah swt. dalam Q.s An-Anfal 18:28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.³⁷

M A K A S S A R

³⁶Mohammad Taufik Makarao, “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”(Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 1.

³⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 143.

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (pasal 45 ayat (1)). Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya (ayat (2)). Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat (3)). Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan (pasal 46). Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (pasal 47 ayat (1)).

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban orang tua yang maksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (pasal 45). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas.³⁸

Hukum kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Hukum atau Undang-Undang kesejahteraan anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁸ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK , 2016), h. 10-47

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b) Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- c) Bahwa didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d) Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.
- e) Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 secara umum dikatakan: suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi kegenerasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan pendapat pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau

tingkat sosial, kaya atau miskin, keturunan atau statu. Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.³⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menyatakan, (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik. (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandunagan maupun sesudah dilahirkan. (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 (1) anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dengan lanjut dengan Peraturan Presiden.

³⁹Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anakdan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 14

B. *Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014*

Dalam undang-undang nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatun pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain (pasal 9 ayat 1a). selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2). Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal ayat 1).

Kemudian dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- b. Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh, kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

(pasal 16 ayat 2) : setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan publik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Perlibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (pasal 15).⁴⁰

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa:

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5) dan hak untuk beribadah, berfikir, dan berekspresi (pasal 6).

Anak juga memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁴¹

⁴⁰Muhammad Ikrar Abustan, *Kawin Paksa Terhadap Anak Perspektif fiqh dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 34.

⁴¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Semarang, PT Citra Aditya Bakti, 2015). h. 29

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setia anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu upaya dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip

hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah menegaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi Anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.⁴²

Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum, mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perumusan naskah KHA dimulai sejak 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir Konvensi dapat diterima dan setuju dengan suara bulat oleh majelis umum PBB. Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990.⁴³

⁴²*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 45.

⁴³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*

BAB IV

ANALISI KOMPORATIF ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar dan tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam masa pengasuhan anak tersebut (pasal 28 ayat (1)). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak berhak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (ayat 2).

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

berlandaskan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2) :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴⁴

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalau dapat

⁴⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK 2016), h. 37

diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, Apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁴⁵

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturanlain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bismar siregar mengatakan bahwa:

“masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budayanya”.⁴⁶

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dari psikis (pasal 15). Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1). Setiap anak

⁴⁵Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Presindo, 1985), h.12

⁴⁶Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (ayat 2) . penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat 3).

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (pasal 17 ayat 1):

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya pembinaan dari pekerja sosial, konsultasi dari psikologi dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (ayat 2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan (pasal 18). Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Dalam hal orang tua, melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut (pasal 30 ayat 1). Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh dilakukan melalui penetapan pengadilan (ayat 2). Salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan kepengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu (pasal 31 ayat 1). Apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan hak kuasa asuh orang tua, dapat juga diajukan oleh pejabat berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.⁴⁷

B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana

Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan kemudian sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (Pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebangkan kepada seorang pelanggar. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bizonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada

⁴⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Jakarta, 2016). h. 42

pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁴⁸

Sehubungan dengan kajian penerapan sanksi pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka dikemukakan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang itu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang disahkan pada tanggal 3 Januari 1997 dimuat dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.⁴⁹

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya pada pelaksana pasal 23 tentang sanksi pidana dan pasal 24 Tentang Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dalam Praktik di Pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pasti dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa :

“Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”⁵⁰

⁴⁸Sholehuddin, *Sistem Hukum Sanksi dalam hukum pidana* (jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2004), h. 32

⁴⁹Musyawwir Syahfar, “Penerapan Sanksi Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum UIN, 2014), h. 16

⁵⁰Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, h. 52.

Undang-Undang yang sering diberlakukan untuk mengadili tindak pidana *pedhophilia* adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Tuntutan maksimal 5 tahun penjara yang dipandang oleh banyak aktifis pelindung anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah *Pedhophilia*, sebab Undang-Undang tersebut secara umum menjadi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24 pasal 24A, 24B, dan 24C pada Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Perwujudan amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang harus menggantikan Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan operasional kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan yang dimaksud merupakan suatu kaidah yang berisi suatu hak, yaitu hak untuk menentukan hukum, sehingga dapat diartikan kekuasaan sebagai kaidah yang mengandung makna berkenaan atau kebolehan untuk bertindak.

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak-

anak, khususnya dalam masalah kasusu pencabulan pada anak-anak. Ketentuan yang mengatur dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam KUHP pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 290, 292, 293, 294, 295. Adapun bunyi dari Pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas sebagai berikut :

Pasal 290 KUHP

”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Ke-1. Barangsiapa melakukan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin.

Ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.

Pasal 292 KUHP : ”Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293 ayat (1) KUHP :”Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur

dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP

”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 295 ayat (1) KUHP:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya pendidikannya, pendidikan atau penjagannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Ke- 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 82

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah)”.⁵¹

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat

⁵¹Republik IndonesiaKitab Undang-Undang Hukum PidanaKUHP (Jakarta: Pratam Publisng)

memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik

pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan sesuai dengan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵²

C. Pandangan hukum Islam

Pandangan hukum Islam terhadap korban tindak pidana Phedofilia dalam Secara tegas dan jelas syara' telah menyatakan dalam nas tentang hukuman jarimah ini. Untuk jarimah zina terdapat dalam QS Al Isra/ 17: 32 yakni sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحْشًا كَبِيرًا
وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَٰئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁵³

Nas tersebut menunjukkan betapa zina itu adalah perbuatan keji dan diharamkan, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hukum (tidak didahului oleh akad nikah) akan dihukum dengan hukum pengasingan, hukuman, dera dan hukuman rajam. Sanksi pidana yang dijatuhkan

⁵²<http://vani.rahmawati-skripsi-pblogspot.co.id/2010.pdf>

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 388

atas sipezina berbeda-beda menurut keadaan pezina itu sendiri. Jika sipezina seorang *muhshan* (sudah bersuami atau beristri), maka sanksi pidana terhadapnya ditetapkan oleh hadis rasul yaitu ‘asif (seorang buruh yang bersetubuh dengan istri majikannya) hadis ma’iz dan hadis ghamidiyyah yaitu dibunuh mati dengan lemparan-lemparan batu (rajam). Pezina yang tidak muhshan yang masih *bikr* (belum bersuami atau belum beristri) maka sanksi pidananya telah ditetapkan dalam alquran sendiri dalam surah an-Nuur Ayat 2, yaitu dicambuk 100 kali.

Hukuman rajam bagi perempuan yang bersuami yang melakukan zina dalam hadis riwayat muslim 5/116.

عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ يَطَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

Artinya:

“Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Abbas RA mengatakan, bahwa Umar bin Khaththab pernah berkata, sambil duduk diatas mimbar Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan Allah pun menurunkan al-Qur'an kepadanya. Diantara ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat yang menerangkan tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga, dan memelihara ayat tersebut. Rasulullah saw telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan kami pun tetap melaksanakannya sepeninggal beliau. Aku merasa khawatir suatu saat nanti akan ada seseorang yang berkata, 'Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah.' Lalu mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diperintahkan Allah. Sesungguhnya dalam al-Qur'an hukuman rajam pasti untuk orang yang berzina yang sudah menikah baik lelaki ataupun perempuan jika telah terbukti (berupa kehamilan atau pengakuan).”⁵⁴

⁵⁴Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1041

Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengertikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Dasar hukumnya terdapat dalam QS An-Nuur/4: 2

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Terjemahnya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (Pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*⁵⁵

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu diketahui bahwa hukuman orang yang berzina apabila sudah pernah menikah adalah rajam. Segolongan ulama dari kalangan baik pezina yang muhsan maupun pezina yang tidak muhsan maka hukuman yang dijatuhkan atas mereka hanyalah hukuman yang Allah tetapkan dalam al-Qur'an dengan jalan mutawatir untuk mengambil hadis-hadis Ahad yang mungkin telah terjadi kehilapan atau kedustaan pada

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 488

perawi-perawinya, sebagaimana tidak boleh membatalkan hukum-hukum al-Qur'an dengan hadis-hadis ahad.

Sanksi pidana yang dijatuhkan atas sipenuduh yang menuduh isteri berzina, sedang dia tidak sanggup membawa 4 (empat) orang saksi untuk membenarkan tuduhannya ialah dicambuk 80 (delapan puluh kali) dan dipandanginya sebagai seorang yang tidak adil sepanjang masa hukuman ini ditetapkan dalam surah An-Nuur Ayat 24.⁵⁶ Untuk jarimah qazdaf nash tentang hukumannya terdapat dalam QS An-Nur /24: 4

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□

Terjemahnya:

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.*⁵⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa qadzaf (menuduh) perempuan yang baik baik melakukan perbuatan zina adalah merupakan salah satu perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana dan diancam dengan hukuman had dan hukuman tambahan berupa tidak boleh menjadi saksi seumur hidup.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang dituduh harus orang baik-baik agar *had* menuduh berzina dapat diberlakukan.⁵⁸ Syariat Islam diturunkan

⁵⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, h.12

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 488

⁵⁸Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, *“Fikih Jinayah” Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, h. 261

oleh Allah Swt untuk melindungi makhluk manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabatnya baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh pencipta manusia yaitu Allah swt. Perbuatan zina seperti dikemukakan di atas merupakan perbuatan yang keji dan sangat tercela. Menuduh seseorang melakukan perbuatan zina baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar. Oleh karena itu, syariat Islam melarang membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang keji dan dilarang oleh hukum Islam. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Atas dasar itu haruslah dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya kumpulan peraturan konkret dari zaman lampau melainkan juga harus dilihat sebagai asas-asas umum dan nilai-nilai universal yang dapat berijtihad di dalam berbagai kondisi yang berubah. Meskipun benar bahwa al-Qur'an adalah sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legislasi dalam mengemukakan pesan-pesannya, nabi secara terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra Islam, tapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun sekali dan untuk selamanya dasar-dasar agama baru. Secara pragmatis, ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan pada masanya.

Cara Preventif pencegahan anak dilindungi sejak dalam kandungan

Dalam Islam juga terdapat beberapa hak-hak anak yang termuat di dalam firman Allah swt. sebagai berikut:⁵⁹

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya⁶⁰.

2. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi dan berdasarkan QS al-Isra/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

⁵⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 18-19

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 817

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*⁶¹

3. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam

QS al-Baqarah/2: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶²

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 388

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 47

Berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara.

1. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 5 hal kewajiban anak di Indonesia yang semestinya dilakukan yaitu:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁶³

Anak wajib menghormati orang tua karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS al-Isra/17: 23

⁶³ Lihat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁴ M. Nasri Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, h. 22

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝١٢٦﴾

Terjemahnya:

*Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*⁶⁵

A. Asas-asas Hukum Perlindungan Anak

Asas hukum sering dikatakan sebagai jantung dari peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum dan peraturan hukum yang pada akhirnya akan dikembalikan pada asas-asas hukum tersebut.⁶⁶ Sehingga meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum acara pidana.

Asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengemukakan asas-asas perlindungan anak sebagai berikut:⁶⁷

1. Asas belum dewasa.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 370

⁶⁶Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 204

⁶⁷Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, h. 141-145

Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dapat dibedakan dalam 3 kategori sebagai berikut:

a) Anak yang berusia di bawah 8 tahun.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan anak belum berusia 8 tahun maka kepada anak tidak dapat diadakan penuntutan sehingga anak sebagai pelaku hanya diberi teguran dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian anak dikembalikan kepada orang tua.

b) Anak yang berusia di bawah $8 < 12$ tahun.

Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 tahun hingga 12 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun, anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan penahanan terhadap dirinya. Anak dalam kategori usia ini juga dianggap belum dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga anak dalam kategori ini hanya

dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, ditempatkan di departemen sosial atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak negara jika perbuatan yang dilakukannya diancam hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) Anak yang berusia $12 < 18$ tahun.

Untuk anak yang berusia $12 < 18$ tahun sudah mulai dianggap dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang melakukan tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari pidana orang dewasa. Namun, proses hukum yang dijalani anak harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang khusus anak.

2. Asas keleluasaan pemeriksaan.

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas keleluasaan ini bertujuan untuk meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak yang diakibatkan ketidakmampuan rasional,

fisik/jasmani, dan rohani atau keterbelakangan yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

3. Asas *probation* atau pembimbingan kemasyarakatan.

Kedudukan *probation* dan *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses peradilan anak. Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah hukum acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat lex generalis*.

Cara Refresif

Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak mempunyai empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi menegaskan bahwa hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap anak. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1) berbunyi Negara-

negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jensi kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Sementara itu, ayat (2) menyatakan Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.⁶⁸ Dengan prinsip tersebut dimaksudkan tidak ada pembedaan perlakuan terhadap anak apapun alasannya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pasal 3 ayat (1) berbunyi dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁶⁹

⁶⁸Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 29

⁶⁹Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 3 Ayat (1)

Dengan demikian semua bentuk perlindungan dan perlakuan siapa pun terhadap anak hendaknya mengutamakan pertimbangan yang terbaik bagi anak, bukan apa yang terbaik bagi orang dewasa. Sebab, biasanya orang dewasa melihat kepentingan anak hanya dari perspektif kepentingan orang dewasa sehingga solusi yang ditawarkan pun tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi anak.⁷⁰

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak

Komite hak anak melihat bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistic karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Pasal 6 ayat (1) menyatakan Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan Negara-negara semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁷¹

Demi menjaga perkembangan anak setidaknya ada lima aspek perkembangan anak yang perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak

⁷⁰Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, h. 241

⁷¹Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 6 Ayat (1) dan (2)

untuk memperoleh informasi, menyangkut pendapat dan berserikat serta perkembangan budaya.⁷²

4. Prinsip Menghargai Pandangan Anak

Pasal 12 ayat (1) menyatakan negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan-pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak.⁷³

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonomi yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.⁷⁴

⁷²Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, h. 242

⁷³Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1)

⁷⁴Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 31

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia

Pandangan hukum Nasional terhadap korban tindak pidana Pedhophilia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedhophilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan dengan seorang dibawah umur. Sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perbuatan cabul, termasuk terhadap anak dibawah umur, diatur dalam pasal 290 KUHP.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedhophilia

Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptkan saling berpasang-pasangan, dan hal ini yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan. Sebagai tanda kekuasaannya, maka jelaslah seksualitasnya mempunyai fungsi yang suci dan saklar. Hubungan antara jenis ini dalam Al-Quran juga menjadi objek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi

juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarananya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyususun mengaharapkan saran agar kiranya semua lapisan masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum harus memahami dampak buruk terhadap korban tindak pidana *pedhofilia* agar saling bahu membahu untuk menjaga hak asasi setiap manusia khususnya bagi perempuan dan anak dibawah umur, dan tatkala penting adalah kita negara hukum harus sadar akan kepastian hukum harus diberlakukan sesuai koridornya tanpa pandang buluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, 2009
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum* (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung, 2007
- Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Abustan, Muahmmad Ikrar, *Kawin Paksa Terhadap Anak Presfektif fiqih dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Skripsi* Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: PTIK , 2016
- Ahmad, Beni Saebani dan Hasan Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali, Zainuddin , *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Asmawi, Muhammad, *Liku-Liku Seks Menyimpan Bagaimana solusinya*, Yogyakarta: Darusalam offset, 2015
- Aries“*PengertianPedhophilia*”,<http://arieszanmyprince.blogspot.com/2012/03/DefenisiPedhofilian.html> 15 juni 2016
- Amandemen Undang-UndangPerlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014*Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Bouhdiba, Abdel Wahab, *Sexsualiy In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*,terj, Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia, 2004
- Chazawi, Adam*Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel* Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Apollo, 1994
- Efendi, Arfan, *Tujuan dan Fungsi Hukum* <http://dimensiilmu.blogspot.com/2013/11/tujuan-dan-fungsi-hukum.html>, 28 oktober 2016

- Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Presindo, 1985
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- , *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mahmud, Ekaputra *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* Medan: USU Pres, 2010
- Maidin, Gulton *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Mappaodang, Muhammad Taufik *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedhophilia*, Skripsi Makassar fak. Hukum UMI
- Makara, Muhammad Taufik *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia"*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011
- Prabowosiwi, Ratih *Pedhophilia dan Kekerasan Seksua : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak* Yogyakarta fak Hukum
- Pieter Herri Zan, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 283-284
- Republik Indonesia, KUHP dan KUHPA Jakarta: Pratama Publishing

Saraswati, Rika *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2015

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2012

Shihab, M. Quraish *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*,

Siregar, Bismar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986

Sholehuddin, *Sistem Hukum Sanksi dalam hukum pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004

Syahfar, Musyawwir *Penerapan Sanksi Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur. Skripsi* Makassar: Fak. Hukum UIN, 2014

Tim Penulis UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah* Makassar: Alauddin Press, 2013

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

LEMBARAN PERBAIKAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahiit

NIM : 10300112093

JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

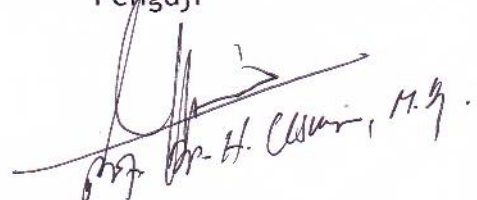
JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhofilian Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional dan
Hukum Islam)"

cat:

- Perbaiki lembaran belakang (juga perbaiki Bab)

Samata, 3 April 2017

Penguji


Dr. H. Chusni, M.P.



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini SENIN tanggal 03 APRIL 2017, saya menempuh Ujian Skripsi/Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Saya akan memperbaiki Skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal :

..... 03 APRIL 2017 - 3 Mei 2017
Selanjutnya saya berjanji akan menyumbangkan sebuah buku Ilmiah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebagai amal jariah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun.

Samata 03 APRIL 2017...

Yang Membuat Pernyataan

syafri Letchur

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syafri Letahiit
NIM : 10300112092
Semester/klpk : VII/II
Angkatan : 2012

*Buat draft no 2.
18/2-2016*

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ☒ 1. Transplantasi Organ Tubuh dalam Analisa Hukum Nasional dan Hukum Islam.
- ☒ 2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Pedhofilialia dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ~~dan hukum Islam~~. *(Analisis (comparative) antara hukum nasional dengan hukum Islam).*
- ☒ Inseminasi dalam pandangan hukum Islam.

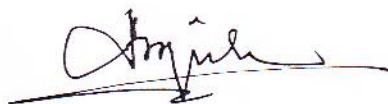
Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Samata, 01 Februari 2016

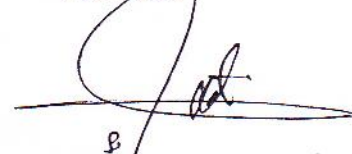
Mengetahui

Penasehat Akademik



(Dr. Abdul Rahman Kanang, M.Pd)
NIP : 19731231 200501 1 034

Pemohon



(Syafri Letahiit)
NIM : 10300112092

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syafri Letahiit
NIM : 10300112092
Tempat/ Tgl. Lahir : Sawai/Ambon 09 Agustus 1993
Jur/ Prodi/ Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/ Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jln Toddopuli 22 Blok 35 No. 12 Rt B
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhophilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara
Hukum Nasional Dengan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 November 2016

Penyusun,

Syafri Letahiit
NIM: 10300112062

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 37 Tahun 2016

T E N T A N G

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2016**

- Menimbang** :
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Menunjuk saudara : 1. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
2. Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Syafri Letahiit
NIM : 10300112092
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Pedophilia* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)
 - Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
- Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.
424836

Samata, 18 Juli 2016

Nomor : SI.2/PP.00.9/17272016
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi
An. Sdr (i). Syafri Letahiit

Kepada YTH.

1. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag (Pembimbing I)
2. Dra. Nila Sastrawati, M. Si (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Juli 2016
Waktu : 13.00 wita
Tempat : Ruang LT Lantai 1 Fak. Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhophilia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif antara Hukum
Nasional dengan Hukum Islam)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Dra. Nila Sastrawaty, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HPK/2016


Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Pedophilia* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)

Gowa, 3018 Agustus 2016


Penyusun,


Syafri Letahiit
Nim. 10300112092

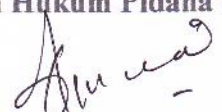
Pembimbing I


Dr. Dadung Abdullah, M. Ag
Nip. 19540203 198503 1 002

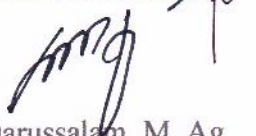
Pembimbing II


Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan


Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : SL.1/PP.00.9/ 03 /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
H a l : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 13 Januari 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Kurniati, M.Hi (Sekertaris)
 3. Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag (Penguji I)
 4. Drs. Subehan Khalik, M.Ag (Penguji II)
 5. Dr. Dudung Abduliah, M.Ag (Pembimbing I)
 6. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Syafri Letahit

N I M : 10300112092

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2017

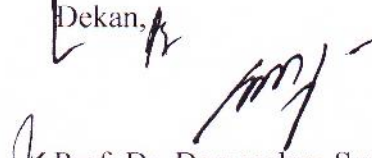
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00

Tempat : Ruang LT

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003P

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahit

NIM : 10300112092

JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhopfelia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif antara Hukum nasional
dan Hukum Islam)"

Perbaiki sesuai Petunjuk Penguji

Samata, 17 Januari 2017

Penguji

[Signature]
Usman Jmr

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahit

NIM : 10300112092

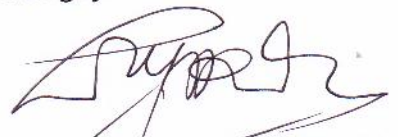
JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhophelia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif antara Hukum nasional
dan Hukum Islam)"

- Pergetikan
- Preventif
- Kuratif


Samata, 17 Januari 2017

Penguji


Dedy Abdulla

FORMAT KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Syahr Latahus
 NIM : 10300112092
 JURUSAN : HUKUM PIDANA & PETATA NEGERAAN.
 JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDA TERHADAP

NO.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
	Kamis/4-8-2016.	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen Hk. Dalam. Al-ISA/17:32 - perofiran ayat. - Sumber kutipan. Kasus JIS - Rumusan masalah. $\leq \frac{2}{3}$ - Definisi operasional - Tujuan - Metode di tinjau. - Komposisi Bal. 	

Makassar,
Dosen Pembimbing


.....



FORMAT KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SYAFI Letahit

NIM : 10300112092

JURUSAN : HKP.

JUDUL SKRIPSI : PERUNDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEDHOFILIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUNDUNGAN ANAK (ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN
HUKUM ISLAM).

NO.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	Rabu - 05 - 2017.	- ayat . - hadis → agigol - (tando syukur) Pemb. I Rov	
2.	Jumat, 06 - 01/2017	Pemb. I Pemb. II Rov	

Makassar, 4/1/2017 .
Dosen Pembimbing


.....



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER10 (.....) WISUDA PERIODEAPRIL.....
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama : SYAFRI UTAHIT

NIM : 10300112092

Jurusan : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PERHOFLIA
DARI LITRAG - LITRAG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERKID
LITRAG ATAS CAHAKIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM NASIONAL
DETERMIN HUKUM ISLAM.

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
3	3,5	4	10,5	3,5

Samata,24/5 - 2017.....

Kasubag
Akademik dan Kemahasiswaan



MUHAJIDAH, S.E

NIP : 19670309 199303 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara **SYAFRI LETAHIT**, NIM : 10300112092, mahasiswa jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan pada fakultas syariah dan hukum uin alaiddin makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, ***"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilian Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional Dengan Hukum Islam)"***. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang ujian munaqasah (akhir).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 24 Maret 2017

Pembimbing I



Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
Nip: 19540203 198503 1 002

Pembimbing II



Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Nip: 19710712 199703 2 002

Penguji I



Prof. Dr. H. Usman Jafar, M. Ag
Nip: 19580901 199102 1 001

Penguji II



Subehan Khalik, S. Ag., M. Ag
Nip: 19701018 1997031 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : ~~150~~ /SI.1/PP.00.9/ ~~3~~ /2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 31 Maret 2017

Kepada

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag (Sekertaris)
3. Prof. Dr. H. Usman, M.Ag (Penguji I)
4. Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag (Penguji II)
5. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag (Pembimbing I)
6. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Safri Letahiit

N I M : 10300112092

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2017

Buka Sidang : 08.30 WITA

Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahiit

NIM : 10300112092

JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilian
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Analisis Komparatif Hukum Nasional dan Hukum Islam)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	Ketua	1.
2.	Dr. Hamsir, M.Hum.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	Pembimbing	3.
4.	Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	Pembimbing	4.
5.	Prof. Dr. Usman, M.Ag.	Penguji	5.
6.	Subehan Khalik, M.Ag.	Penguji	6.
7.	Drs. Aminullah	Pelaksana	7.
8.	Nasira Asri, S.Kom	Pelaksana	8.
9.	Syahrani Samudra SYAFRI LETAHIT.	Mahasiswa	9.

Samata, 3 April 2017

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahiit

NIM : 10300112092

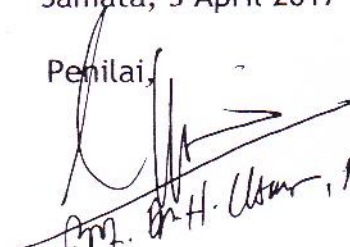
JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilian Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional dan Hukum Islam)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		90 / A-
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	90 / A-

Samata, 3 April 2017

Penilai,


Prof. Dr. H. Utami, M. H.,
.....

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahiit

NIM : 10300112092

JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhofilian Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional dan
Hukum Islam)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	④ rata

Samata, 3 April 2017

Penilai,

By
Kubehau (Chalid)

.....

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahiit

NIM : 10300112092

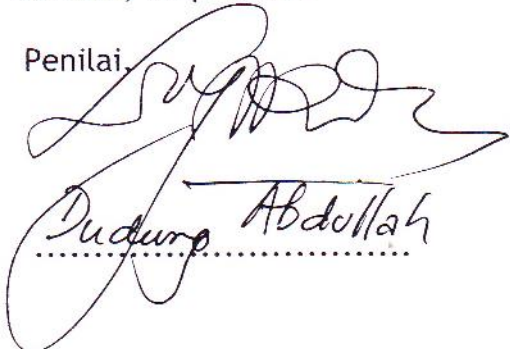
JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhofilian Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional dan
Hukum Islam)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	3,9

Samata, 3 April 2017

Penilai,


Dukung Abdullah

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Syafri Letahiit

NIM : 10300112092

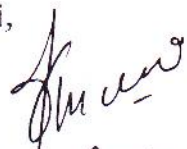
JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pedhofilian Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional dan
Hukum Islam)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Periguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	Agat (4)

Samata, 3 April 2017

Penilai,


Nila Sastrawati
.....



“ RIWAYAT HIDUP”

Syafri Letahiit, Lahir Di Kota Ambon Pada Tanggal 09 Agustus 1993. Anak Pertama Dari Kasman Letahiit Dan Aliyah Wahid Memulai Meranjak Pendidikan SD Negeri 1 Sawa Pada Tahun 2000, Seram Utara Maluku Tengah Kemudian Tamat Dari Pendidikan Dasar Pada Tahun 2006. Kemudian Melanjutkan SMP Negeri 6 Seram Utara Maluku Tengah Dan Tamat Pada Tahun 2009. Ditahun Yang Sama Penyusun Melanjutkan Pendidikan Ke SMAM 09 Makassar Tamat Pada Tahun 2012

Setelah Lulus Dari SMAM 09 Makassar, Pada Tahun Yang Sama Penyusun Melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dengan Mengambil Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum.